

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum

Objek penelitian dalam studi ini mencakup 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang secara administratif terbagi atas 29 wilayah Kabupaten dan 6 wilayah Kota. Dengan bentang wilayah seluas 3,25 juta hektar, Provinsi Jawa Tengah menguasai sekitar 25,04 persen dari keseluruhan luas daratan Pulau Jawa. Secara geografis, posisi Provinsi Jawa Tengah dinilai sangat strategis lantaran kawasannya diapit secara langsung oleh tiga provinsi besar (Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta) serta berbatasan dengan wilayah laut dan samudra, dengan menempatkan Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan atau ibu kota provinsi.

Tabel 4. 1 Daftar Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
1.	Kabupaten Banjarnegara	19.	Kabupaten Pemasang
2.	Kabupaten Banyumas	20.	Kabupaten Purbalingga
3.	Kabupaten Batang	21.	Kabupaten Purworejo
4.	Kabupaten Blora	22.	Kabupaten Rembang
5.	Kabupaten Boyolali	23.	Kabupaten Semarang
6.	Kabupaten Brebes	24.	Kabupaten Sragen
7.	Kabupaten Cilacap	25.	Kabupaten Sukoharjo
8.	Kabupaten Demak	26.	Kabupaten Tegal
9.	Kabupaten Grobogan	27.	Kabupaten Temanggung
10.	Kabupaten Jepara	28.	Kabupaten Wonogiri
11.	Kabupaten Karanganyar	29.	Kabupaten Wonosobo
12.	Kabupaten Kebumen	30.	Kota Magelang
13.	Kabupaten Kendal	31.	Kota Pekalongan
14.	Kabupaten Klaten	32.	Kota Salatiga
15.	Kabupaten Kudus	33.	Kota Semarang

No.	Kabupaten/Kota	No.	Kabupaten/Kota
16.	Kabupaten Magelang	34.	Kota Surakarta
17.	Kabupaten Pati	35.	Kota Tegal
18.	Kabupaten Pekalongan		

Sumber: (PemprovJateng, 2026)

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang sangat beragam, karena didukung dengan lokasi geografis yang mendukung. Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi besar di banyak sektor. Berdasarkan data dari PPID Jawa Tengah tahun 2025, Provinsi Jawa Tengah berhasil menjadi provinsi kedua produksi padi nasional, Kota Surakarta menjadi kota yang kaya di sektor ekonomi kreatif yang sudah ditetapkan sebagai anggota jejaring kota kreatif UNESCO, Kota Pekalongan dengan potensi penghasil batik, Kabupaten Brebes juga terkenal sebagai penghasil kota telur asin dan bawang merah terbesar di Indonesia.

Besarnya potensi yang tersebar di berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, baik pada sektor kekayaan alam, pariwisata, hingga industri, diindikasikan mampu mendongkrak perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pos pajak dan retribusi daerah, dengan catatan dikelola secara maksimal oleh Pemerintah Daerah setempat

Data sekunder yang menjadi basis dalam penelitian ini diperoleh langsung dari laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, berupa dokumen laporan realisasi APBD serta realisasi TKDD Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah tahun pengamatan 2022-2024. Penentuan unit amatan dijalankan lewat metode sensus atau teknik sampel jenuh. Struktur pengujian dalam model regresi ini melibatkan PAD, DAU, DAK, beserta

DBH selaku kelompok variabel bebas, serta pos Belanja Daerah yang ditempatkan sebagai variabel terikat.

#### 4.2 Statistika Deskriptif

Analisis statistik deskriptif diimplementasikan pada fase awal pemrosesan data guna menyajikan karakteristik dari variabel-variabel yang diteliti. Melalui pendekatan ini, gambaran umum mengenai distribusi data diperoleh melalui nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*), serta standar deviasi. Adapun komponen data yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian ini meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Belanja Daerah (BD).

Tabel 4. 2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif					
Variabel	Jumlah Observasi	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	105	235.330.355.960	2.885.774.306.352	490.286.283.313,38	393.384.208.231,00
DAU	105	409.630.000.000	1.455.090.000.000	945.940.476.190,48	246.901.943.590,59
DAK	105	88.940.000.000	754.670.000.000	408.130.666.666,67	141.505.712.743,25
DBH	105	25.850.000.000	342.880.000.000	63.670.571.428,57	60.875.539.372,568
Belanja Daerah	105	932.071.471.274	5.499.006.330.559	2.370.582.593.294,65	779.831.245.816,16

Sumber: data sekunder diolah penulis melalui SPSS V.26

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui terdapat 105 data yang diobservasi, penelitian analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari tiap-tiap variabel yang akan diteliti dengan hasil analisis sebagai berikut:

1. Variabel PAD memiliki 105 observasi dengan nilai minimum sebesar Rp235.330.355.960. Nilai minimum ini dimiliki oleh Kabupaten Wonosobo

pada tahun 2023, yang mencerminkan terbatasnya kemampuan fiskal mandiri daerah tersebut. Nilai maksimum PAD sebesar Rp2.885.774.306.352 dimiliki oleh Kota Semarang pada tahun 2024. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah dengan aktivitas perdagangan, industri, dan jasa yang sangat berkembang, Kota Semarang memiliki pajak daerah yang jauh lebih besar sehingga mampu menghasilkan PAD tertinggi di Jawa Tengah. Nilai rata-rata PAD sebesar Rp490.286.283.313,38 lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar Rp393.384.208.231, sehingga data PAD tergolong homogen dan tidak terdapat penyimpangan data yang besar. Meskipun demikian, nilai standar deviasi yang mulai mendekati nilai rata-ratanya mengindikasikan adanya kecenderungan sebaran data yang cukup bervariasi antar kabupaten/kota, yang mencerminkan adanya ketimpangan kemampuan fiskal mandiri antar daerah di Jawa Tengah.

2. Variabel DAU memiliki 105 observasi dengan nilai minimum sebesar Rp409.630.000.000 yang diterima oleh Kota Magelang pada tahun 2022. Nilai maksimum DAU sebesar Rp1.455.090.000.000 diterima oleh Kabupaten Brebes pada tahun 2024. Nilai rata-rata DAU sebesar Rp945.940.476.190,48 lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar Rp246.901.943.590,59, sehingga data DAU tergolong homogen dan tidak terdapat penyimpangan data yang besar. Selisih antara *mean* dan standar deviasi yang cukup jauh mengindikasikan bahwa distribusi DAU antar kabupaten/kota di Jawa Tengah relatif merata, yang mencerminkan

keberhasilan pemerataan fiskal DAU sebagaimana diamanatkan UU No. 1 Tahun 2022.

3. Variabel DAK memiliki 105 observasi dengan nilai minimum sebesar Rp88.940.000.000 yang diterima oleh Kota Magelang pada tahun 2022. Nilai maksimum DAK sebesar Rp754.670.000.000 diterima oleh Kabupaten Cilacap pada tahun 2024. Kabupaten Cilacap sebagai kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang besar di berbagai sektor wajar mendapatkan alokasi DAK tertinggi. Nilai rata-rata DAK sebesar Rp408.130.666.666,67 lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar Rp141.505.712.743,25, sehingga data DAK tergolong homogen dan tidak terdapat penyimpangan data yang besar. Selisih antara mean dan standar deviasi yang cukup jauh mengindikasikan bahwa alokasi DAK antar kabupaten/kota di Jawa Tengah relatif terdistribusi secara konsisten sesuai dengan kriteria teknis yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
4. Variabel DBH memiliki 105 observasi dengan nilai minimum sebesar Rp25.850.000.000 yang diterima oleh Kota Salatiga pada tahun 2024. Nilai maksimum DBH sebesar Rp342.880.000.000 diterima oleh Kabupaten Kudus pada tahun 2023. Kabupaten Kudus dikenal sebagai pusat industri rokok terbesar di Indonesia, sehingga penerimaan dari DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) menjadi kontributor utama yang mendorong perolehan DBH Kabupaten Kudus. Nilai rata-rata DBH sebesar Rp63.670.571.428,57 lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar Rp60.875.539.372,568, sehingga data DBH tergolong homogen dan tidak

terdapat penyimpangan data yang besar. Meskipun demikian, nilai standar deviasi yang sangat mendekati nilai rata-ratanya mengindikasikan adanya kecenderungan sebaran data yang cukup bervariasi antar kabupaten/kota, yang mencerminkan perbedaan potensi SDA dan industri masing-masing daerah yang sangat besar di Jawa Tengah.

5. Variabel belanja daerah memiliki 105 observasi dengan nilai minimum sebesar Rp932.071.471.274 yang dimiliki oleh Kota Salatiga pada tahun 2022. Nilai maksimum belanja daerah sebesar Rp5.499.006.330.559 dimiliki oleh Kota Semarang pada tahun 2024. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Semarang memiliki kebutuhan belanja yang jauh lebih besar untuk membiayai pelayanan publik, infrastruktur kota, dan aparatur pemerintahan yang lebih kompleks. Konsistensi antara PAD tertinggi dan belanja daerah tertinggi yang sama-sama dimiliki Kota Semarang memperkuat temuan penelitian bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Nilai rata-rata (*mean*) belanja daerah sebesar Rp2.370.582.593.294,65 lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi sebesar Rp779.831.245.816,16, yang berarti tingkat sebaran data terbilang kecil dan bersifat homogen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat belanja daerah antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah memiliki tingkat penyimpangan yang rendah.

### **4.3 Analisis Data**

#### **4.3.1 Uji Asumsi Klasik**

Pengujian asumsi klasik merupakan sebuah syarat dilakukan regresi linear berganda hal ini digunakan agar tidak terjadi bias dan efisien (Indartini &

Mutmainah, 2024). Uji Asumsi Klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi yang akan dijelaskan setiap analisis nya sebagai berikut:

#### 4.3.1.1 Uji Normalitas

Pemeriksaan asumsi klasik diawali dengan uji normalitas untuk memastikan status distribusi normal pada komponen nilai residual. Instrumen pengujian yang dipilih dalam penelitian ini adalah uji *Kolmogorov-Smirnov*. Penggunaan metode tersebut didasarkan pada pertimbangan kuantitas data yang digunakan, di mana jumlah sampel yang diolah telah melampaui batas minimum 40 data (Ahadi et al., 2023).

Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov – Smirnov

<b>Uji Normalitas- Kolmogorov-Smirnov</b>	
N	105
Sig (2-tailed)	0,200
Keterangan Data Normal (0,200>0,05)	

Sumber: data sekunder diolah penulis melalui SPSS V.26

Berdasarkan hasil pengujian dari uji normalitas melalui Kolmogorov Smirnov pada Tabel 4.3 menunjukkan koefisien signifikansi di tingkat 0,200. Hasil yang berada di atas 0,05 ini memberikan kesimpulan bahwa data yang diuji berdistribusi normal (Ghozali, 2021). Melalui hasil pembuktian statistik ini, asumsi normalitas dinyatakan terpenuhi dan pemrosesan data dapat diteruskan ke tahapan selanjutnya.

#### 4.3.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk melakukan uji terhadap model regresi apakah terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Uji multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai tolerance dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) (Ghozali, 2021).

Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas

<b>Uji Multikolinearitas</b>			
<b>Variabel</b>	<b>Tolerance</b>	<b>VIF</b>	<b>Keterangan</b>
PAD	0,681	1,468	Bebas Multikolinearitas
DAU	0,126	7,939	Bebas Multikolinearitas
DAK	0,137	7,293	Bebas Multikolinearitas
DBH	0,833	1,201	Bebas Multikolinearitas

Sumber: data sekunder diolah penulis melalui SPSS V.26

Berdasarkan sajian data pengujian asumsi klasik pada Tabel 4.3, kriteria bebas multikolinieritas telah terpenuhi yang tercermin dari perolehan koefisien *tolerance* tiap variabel bebas yang bernilai di atas 0,10. Kondisi ini memberikan konfirmasi bahwa tidak terdapat masalah korelasi linier yang kuat di antara variabel-variabel independen. Hal ini diperkuat oleh nilai VIF yang secara keseluruhan berada di bawah skala 10 (Ghozali, 2021). Dengan demikian, kesimpulan yang ditarik menetapkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas dalam model ini, sehingga valid untuk pengujian selanjutnya.

#### 4.3.1.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dioperasikan dengan tujuan untuk mendeteksi keberadaan hubungan korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ( $t-1$ ) dalam sebuah model regresi (Ghozali,

2021). Evaluasi terhadap gejala ini dilakukan melalui penerapan uji Durbin-Watson. Agar model estimasi dinyatakan lolos dari masalah autokorelasi, kriteria pengambilan keputusan setelah pengujian wajib memenuhi prasyarat empiris di mana nilai Durbin-Watson hitung ( $d$ ) berada pada rentang  $du < d < 4 - du$ .

Tabel 4. 5 Hasil Uji Autokorelasi

<b>Uji Autokorelasi</b>				
<b>Durbin Watson (d)</b>	<b>dU</b>	<b>4-dU</b>	<b>dL</b>	<b>Keterangan</b>
0,966	1,7617	2,2383	1,6038	Terjadi Autokorelasi

Sumber: data sekunder diolah penulis melalui SPSS V.26

Tabel 4.5 menunjukkan hasil nilai Durbin-Watson ( $d$ ) sebesar 0,966. Selanjutnya untuk bisa diinterpretasikan memerlukan nilai batas bawah Durbin-Watson ( $dL$ ), nilai batas atas Durbin Watson ( $d$ ), dan nilai dari 4- $d$ . Nilai  $dL$  dan  $dU$  dapat diperoleh melalui tabel Durbin-Watson dengan nilai signifikansi 5%, diketahui jumlah variabel bebas ( $k$ ) = 4 dengan banyaknya data ( $n$ ) = 105. Maka, diperoleh nilai  $dL$  = 1,6038, nilai  $dU$  = 1,7617, dan nilai 4- $Du$  = 2,2383. Sesuai dengan hasil yang dilakukan, uji menunjukkan hasil  $0 < d < dL$ , yang artinya terdapat autokorelasi ( $0 < 0,966 < 1,6038$ ).

Dapat dilakukan pengujian lain atau analisis lanjutan untuk memperbaiki atau mengobati adanya autokorelasi yaitu menggunakan metode *Cochrane-Orcutt* atau transform data. Metode ini dinilai dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan masalah autokorelasi. Tabel 4.5 merupakan hasil uji autokorelasi menggunakan metode *Cochrane-Orcutt*.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi Metode Cochrane-Orcutt

Uji Autokorelasi			
Durbin Watson (d)	dU	4-dU	Keterangan
2,196	1,7617	2,2383	Bebas Autokorelasi

Sumber: data sekunder diolah penulis melalui SPSS V.26

Berdasarkan output pengolahan data pada Tabel 4.6, koefisien Durbin-Watson (d) yang baru tercatat di tingkat 2,196. Jika nilai tersebut dievaluasi menggunakan standar tabel Durbin-Watson ( $\alpha = 5\%$ ,  $k = 4$ ,  $n = 105$ ), maka diperoleh parameter batas  $d_l = 1,6038$ ,  $d_u = 1,7617$ , dan  $4 - d_u = 2,2383$ . Hasil komparasi menunjukkan bahwa posisi nilai hitung berada tepat pada rentang kriteria ideal, yakni  $1,7617 < 2,196 < 2,2383$  ( $d_u < d < 4 - d_u$ ). Temuan statistik ini membuktikan bebasnya gejala autokorelasi di dalam model regresi. Kesimpulan yang ditarik menetapkan bahwa bebas autokorelasi pada model penelitian, sehingga kelayakan model dinyatakan memenuhi syarat untuk uji pada fase pengujian hipotesis.

#### 4.3.1.4 Uji Heteroskedastisitas

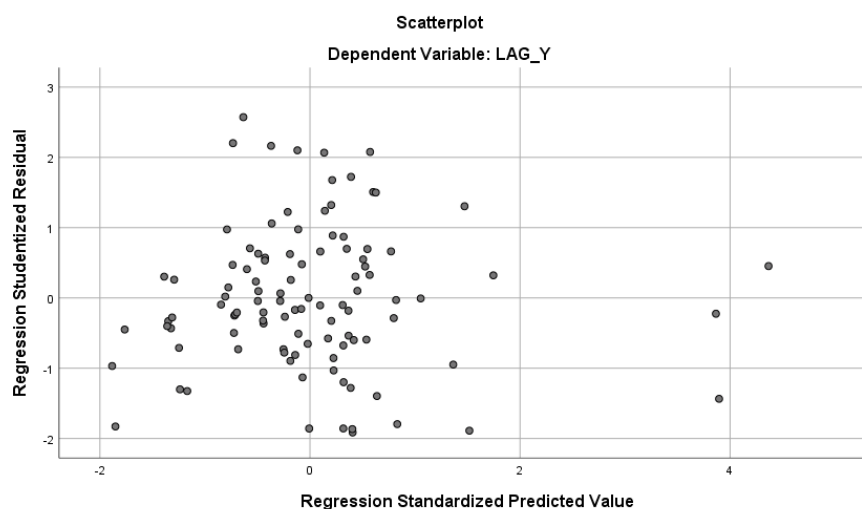
Menurut Ghozali (2021), kepastian mengenai apakah nilai varians residual bersifat konstan atau tidak antar-observasi dievaluasi menggunakan uji heteroskedastisitas. Bebasnya model dari penyimpangan asumsi heteroskedastisitas merupakan syarat bagi pembentukan model estimasi yang valid. Pengamatan secara visual dapat dilakukan melalui grafik *scatterplot*.

##### 4.3.1.4.1 Scatterplot

Deteksi terhadap keberadaan gejala heteroskedastisitas di dalam model regresi dapat dianalisis secara visual melalui grafik *scatterplot*. Munculnya indikasi heteroskedastisitas ditandai dengan terbentuknya pola geometris tertentu pada

grafik, seperti susunan titik yang bergelombang, atau melebar kemudian menyempit. Konfirmasi mengenai terpenuhinya asumsi model regresi yang terbebas dari masalah heteroskedastisitas diperoleh apabila sebaran titik-titik data tampak menyebar secara acak. Kondisi tersebut ditandai dengan posisi titik-titik residual yang menempati area di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk suatu pola geometris yang teratur (Ghozali, 2021).

Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan uji Scatterplot



Sumber: data sekunder diolah penulis melalui SPSS V.26

Melalui pengamatan visual terhadap data yang tersaji pada Gambar 4.1, terkonfirmasi bahwa titik-titik residual yang dihasilkan tidak membentuk suatu pola struktural tertentu yang teratur. Sebaran titik-titik tersebut tampak tersebar secara acak, baik pada area di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Berdasarkan karakteristik grafis tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi yang diestimasi telah terbebas dari masalah gangguan heteroskedastisitas. Kondisi ini

memberikan pembuktian bahwa model penelitian telah memenuhi prasyarat kelayakan statistik dan valid untuk dioperasikan pada tahapan pengujian hipotesis.

#### 4.3.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda diimplementasikan dengan tujuan untuk menguji hubungan linear yang terbentuk antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Melalui ini, nilai variabel dependen dapat diprediksi secara matematis apabila variabel-variabel independennya mengalami kondisi kenaikan ataupun penurunan (Indartini & Mutmainah, 2024).

Tabel 4. 7 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B
Konstanta	-9.690.487.589,405
PAD	1,046
DAU	1,343
DAK	1,335
DBH	0,960

Sumber: data sekunder diolah penulis melalui SPSS V.26

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.7 didapatkan persamaan regresi pada penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = -9.690.487.589,405 + 1,046X_1 + 1,343X_2 + 1,335X_3 + 0,960X_4 + e$$

Berdasarkan hasil persamaan yang didapatkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perolehan nilai konstanta dalam model tercatat sebesar -9.690.487.589,405, yang memberikan makna bahwa apabila seluruh variabel independen, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berada pada kondisi konstan, bernilai 0 (nol), atau diasumsikan tidak ada, maka kuantitas variabel dependen Belanja Daerah diprediksi akan tetap terealisasi sebesar  $-9.690.487.589,405$ .

2. Koefisien regresi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh sebesar 1,046. Nilai tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel PAD mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka variabel dependen Belanja Daerah (Y) diprediksi akan mengalami kenaikan sebesar 1,046.
3. Koefisien regresi untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAU) diperoleh sebesar 1,343. Nilai tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel DAU mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka variabel dependen Belanja Daerah (Y) diprediksi akan mengalami kenaikan sebesar 1,343.
4. Koefisien regresi untuk variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) diperoleh sebesar 1,335. Nilai tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel DAK mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka variabel dependen Belanja Daerah (Y) diprediksi akan mengalami kenaikan sebesar 1,335.
5. Koefisien regresi untuk variabel Dana Bagi Hasil (DBH) diperoleh sebesar 0,960. Nilai tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel DBH mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka variabel dependen Belanja Daerah (Y) diprediksi akan mengalami kenaikan sebesar 0,960.

### 4.3.3 Uji Hipotesis

#### 4.3.3.1 Koefisien Determinasi $R^2$

*R-Square* ( $R^2$ ) berfungsi untuk mengukur seberapa jauh variabel independen bisa menerangkan naik turunnya nilai variabel dependen (Indartini & Mutmainah, 2024). Nilai *Adjusted R Square* digunakan sebagai acuan untuk melihat besarnya angka *R-Square* ( $R^2$ ) di dalam model regresi linear berganda

Tabel 4. 8 Hasil R-Square ( $R^2$ )

<b>Uji Koefisien Determinasi</b>	
R	Adjusted R Square
0,993	0,986

Sumber: data sekunder diolah penulis melalui SPSS V.26

Merujuk pada data yang tersaji dalam Tabel 4.7, besaran nilai koefisien determinasi yang dihasilkan adalah sebesar 98,6%. Angka ini menunjukkan bahwa variasi variabel dependen Belanja Daerah mampu dipengaruhi oleh kombinasi variabel independen yang meliputi PAD, DAU, DAK, dan DBH. Sementara itu, sisa persentase sebesar 1,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel bebas yang diuji dalam penelitian ini.

#### 4.3.3.2 Uji F

Uji F dilakukan bertujuan untuk melihat apakah variabel independen memiliki pengaruh secara linear/ simultan dengan variabel dependen (Ghozali, 2021)

Tabel 4. 9 Hasil Uji F

<b>Uji F</b>		
F	Sig.	Keterangan
1.867,520	0,000	Terdapat Pengaruh

Sumber: data sekunder diolah penulis melalui SPSS V.26

Uji F dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi dari hasil pengolahan data. Berdasarkan angka yang tertera pada Tabel 4.8, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, di mana nilai ini lebih kecil daripada alpha 0,05. Dengan hasil tersebut, model regresi ini dinyatakan layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen Belanja Daerah. Hal ini juga menunjukkan bahwa variabel independen (PAD, DAU, DAK, dan DBH), baik secara salah satu maupun bersama-sama, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah.

#### 4.3.3.3 Uji T

Uji T merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat pengaruh secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen (Indartini & Mutmainah, 2024).

Tabel 4. 10 Hasil Uji t

Uji t				
Variabel	B	t	Sig.	Keterangan
PAD	1,046	33,634	0,000	H1 Diterima
DAU	1,343	13,395	0,000	H2 Diterima
DAK	1,335	7,590	0,000	H3 Diterima
DBH	0,960	5,835	0,000	H4 Diterima

Sumber: data sekunder diolah penulis melalui SPSS V.26

Analisis terhadap hasil uji t dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi masing-masing variabel dengan nilai alpha 0,05. Apabila nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari alpha 0,05, maka secara parsial variabel independen dinyatakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Adapun hasil pengujian uji t tersebut telah dirangkum dalam Tabel 4.10, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Variabel independen  $X_1$  (PAD) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai ini lebih kecil dari nilai alpha 0,05 terhadap variabel dependen Y (Belanja Daerah), dengan nilai koefisien bernilai positif. Artinya  $X_1$  (Pendapatan Asli Daerah) secara parsial berpengaruh positif terhadap Y (Belanja Daerah), maka **H1 diterima**
2. Variabel independen  $X_2$  (DAU) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai ini lebih kecil dari nilai alpha 0,05 terhadap variabel dependen Y (Belanja Daerah), dengan nilai koefisien positif. Artinya  $X_2$  (Dana Alokasi Umum) secara parsial berpengaruh positif terhadap Y (Belanja Daerah), maka **H2 diterima**
3. Variabel independen  $X_3$  (DAK) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai ini lebih kecil dari nilai alpha 0,05 terhadap variabel dependen Y (Belanja Daerah), dengan nilai koefisien positif. Artinya  $X_3$  (Dana Alokasi Khusus) secara parsial berpengaruh positif terhadap Y (Belanja Daerah), maka **H3 diterima**
4. Variabel independen  $X_4$  (DBH) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai ini lebih kecil dari nilai alpha 0,05 terhadap variabel dependen Y (Belanja Daerah), dengan nilai koefisien positif. Artinya  $X_4$  (Dana Bagi Hasil) secara parsial berpengaruh positif terhadap Y (Belanja Daerah), maka **H4 diterima**

#### 4.3.4 Analisis *Flypaper Effect*

Dasar pengambilan keputusan apakah terdapat fenomena *flypaper effect* sebagai berikut (Tiffany, 2025):

1. Apabila PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah, atau
2. Apabila koefisien dari dana transfer (DAU, DAK, dan DBH) lebih besar dibandingkan dengan koefisien PAD, dan keduanya memiliki tingkat signifikansi yang sebanding.

Berdasarkan uji t yang dilakukan, menunjukkan hasil pengujian pada Tabel 4.10 menunjukkan hasil PAD berpengaruh positif terhadap belanja daerah ( $0,000 < 0,05$ ), maka langkah selanjutnya untuk menganalisis fenomena *flypaper effect* dapat dilakukan dengan membandingkan nilai koefisien dari PAD dan dana transfer (PAD, DAU, DAK). Tabel 4.10 digunakan untuk membantu proses analisis *Flypaper Effect*. Tabel ini berisikan nilai koefisien dan signifikansi dari PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Daerah yang sebelumnya sudah dilakukan uji t pada Tabel 4.10.

Tabel 4. 11 Nilai Koefisien dan Signifikansi Variabel Independen

<b>Variabel</b>	<b>Nilai Koefisien</b>	<b>Sig.</b>
PAD	1,046	0,000
DAU	1,343	0,000
DAK	1,335	0,000
DBH	0,960	0,000

Sumber: data sekunder diolah penulis melalui SPSS V.26

Hipotesis kelima atau H5 dinyatakan diterima karena hasil pengujian membuktikan terjadinya fenomena *Flypaper Effect* di dalam model penelitian ini. Kesimpulan tersebut diambil setelah melihat seluruh variabel independen yang memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 di mana angka ini lebih kecil dari 0,05. Fenomena ini diperkuat oleh nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah atau PAD sebesar 1,046 yang posisinya terbukti lebih kecil jika dibandingkan dengan akumulasi nilai koefisien dana transfer dari pusat yang mencapai angka 3,638 hasil

dari penjumlahan nilai DAU sebesar 1,343 ditambah DAK sebesar 1,335 dan DBH sebesar 0,960.

#### 4.4 Interpretasi Hasil

Jawaban terhadap lima hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini diperoleh setelah dilakukan pengolahan data menggunakan model regresi linear berganda. Adapun ringkasan dari hasil pengujian kelima hipotesis tersebut melalui pendekatan uji t telah dirangkum ke dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. 12 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Dasar Pengambilan Keputusan	Keputusan
H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah	Nilai Signifikansi lebih kecil dibandingkan nilai alpha (0,05), yaitu $0,000 < 0,005$	Diterima
H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah	Nilai Signifikansi lebih kecil dibandingkan nilai alpha (0,05), yaitu $0,000 < 0,005$	Diterima
H3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah	Nilai Signifikansi lebih kecil dibandingkan nilai alpha (0,05), yaitu $0,000 < 0,005$	Diterima
H4: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah	Nilai Signifikansi lebih kecil dibandingkan nilai alpha (0,05), yaitu $0,000 < 0,005$	Diterima
H5: Terjadi fenomena Flypaper Effect pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2024	Nilai koefisien PAD lebih kecil daripada nilai koefisien DAU, DAK, dan DBH, yaitu sebesar $1,046 < 3,638 (1,343 + 1,335 + 0,960)$	Diterima

Sumber: data diolah penulis (2026)

##### 4.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan dari hasil uji hipotesis (Uji t) hipotesis pertama menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja

Daerah secara parsial pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2024. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai signifikansi lebih rendah sebesar 0,000 dari alpha yaitu 0,05 ( $0,000 < 0,005$ ) dengan nilai koefisien positif. Artinya setiap kenaikan PAD diikuti dengan kenaikan Belanja Daerah. Berdasarkan hasil pengujian, maka H1 dapat diterima karena hasil menunjukkan adanya pengaruh positif secara parsial pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah.

Kondisi ini memberikan petunjuk bahwa naik turunnya perolehan PAD memiliki pengaruh langsung terhadap penentuan belanja daerah. Kapasitas kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun anggaran fiskal akan semakin kuat sejalan dengan bertambahnya realisasi target PAD (Jannah, 2020).

Dari perspektif teori keagenan yang diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (1976), Pemerintah Daerah sebagai agen mampu merespon PAD. Ketika PAD meningkat, Pemerintah Daerah meningkatkan Belanja Daerah. Masyarakat sebagai prinsipal sekaligus wajib pajak, memiliki kepentingan atas penggunaan PAD. Tekanan dari masyarakat yang mendorong Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan penggunaan PAD dalam bentuk Belanja Daerah untuk kebutuhan pembangunan dan fasilitas masyarakat, sikap ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada prinsipal.

Peningkatan PAD membuat daerah memiliki anggaran dana yang lebih luas sehingga dapat membelanjakan untuk kebutuhan pelayanan umum atau infrastruktur daerah lebih leluasa. Kondisi ini tidak selalu positif, asimetri informasi

antara pusat dan daerah serta *self interest* mendorong agen membelanjakan dana tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Daerah yang mampu mengoptimalkan PAD dan mengalokasikan secara tepat maka daerah tersebut memiliki kemandirian fiskal yang tinggi (Maharani & Haryanto, 2025), yang artinya tidak terjadi *Flypaper Effect* di daerah tersebut. Namun, berdasarkan uji t yang sudah dilakukan terbukti terjadi fenomena flypaper effect yang artinya Pemerintah Daerah selaku agen melakukan tindakan oportunistik karena tidak mengoptimalkan penerimaan PAD.

Pengaruh nyata Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah yang ditemukan dalam penelitian ini terbukti sejalan dengan hasil-hasil terdahulu yang telah dikemukakan oleh Agussalim et al. (2022); Hafijah et al. (2025); Nashiri & Amanah (2018); Rohmah & Raharjo (2023)(Tasri, 2023)

Hubungan positif antara PAD dan belanja daerah dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah perluasan kapasitas fiskal daerah saat PAD mengalami peningkatan. Kondisi tersebut memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk merealisasikan belanja pembangunan yang sesuai dengan ekspektasi dan harapan masyarakat.

#### **4.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan dari hasil uji hipotesis (Uji t) hipotesis kedua menunjukkan hasil bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah secara parsial pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2024. Setiap kenaikan DAU diikuti dengan kenaikan Belanja Daerah. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai signifikansi lebih rendah sebesar 0,000 dari alpha

yaitu 0,05 ( $0,000 < 0,005$ ) dengan nilai koefisien positif. Berdasarkan hasil pengujian, maka H2 dapat diterima karena hasil menunjukkan adanya pengaruh positif secara parsial pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah.

Peningkatan pada Belanja Daerah akan terjadi seiring dengan meningkatnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperoleh, hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif di antara kedua variabel tersebut pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Melalui temuan ini, terlihat adanya kecenderungan dari pemerintah daerah yang masih bergantung pada kucuran dana transfer dari pemerintah pusat. (Jannah, 2020).

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, DAU terbagi menjadi dua yaitu *block grant* dan *specific grant*. Pada kebijakan *block grant*, daerah memiliki kewenangan penuh dan Pemerintah Pusat sedikit terbatas dalam pengawasan. Pada DAU *specific grant* walaupun peruntukannya sudah ditentukan, celah asimetri informasi masih bisa terjadi, seperti *output* yang kurang maksimal. Asimetri informasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dapat memberikan ruang bagi agen untuk memaksimalkan belanja baik untuk kegiatan produktif maupun tidak produktif.

Berdasarkan teori keagenan oleh Jensen & Meckling (1976), Pemerintah Pusat sebagai pemberi mandat menyerahkan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya keuangan, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam kerangka desentralisasi fiskal, DAU diberikan dengan tujuan agar

Pemerintah Daerah dapat memanfaatkannya secara efektif dan efisien dalam membiayai kebutuhan belanja daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat untuk Belanja Daerah. Namun, masalah keagenan yang dapat muncul yaitu, apakah alokasi belanja daerah sudah efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hafijah et al., 2025; Indrasari & Kholvieyana, 2021; Nashiri & Amanah, 2018; Rohmah & Raharjo, 2023; Tasri, 2023) Dana Alokasi Umum terbukti memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan DAU akan diikuti oleh meningkatnya Belanja Daerah. Kondisi tersebut terjadi karena DAU digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan, termasuk penyediaan layanan publik dan pelaksanaan pembangunan yang tercermin dalam komponen belanja daerah.

Faktor-faktor yang menjelaskan mengapa peningkatan DAU mendorong kenaikan belanja daerah yaitu DAU merupakan komponen terbesar dalam struktur penerimaan transfer Pemerintah Daerah sehingga perubahan nilainya berdampak terhadap kapasitas belanja dan tekanan dari pusat untuk menggunakan dana transfer untuk membelanjakan kebutuhan daerah.

#### **4.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan dari hasil uji hipotesis (Uji t) hipotesis ketiga menunjukkan hasil bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah secara

parsial pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2024. Setiap kenaikan DAK diikuti dengan kenaikan Belanja Daerah. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai signifikansi lebih rendah sebesar 0,000 dari alpha yaitu 0,05 ( $0,000 < 0,005$ ) dengan nilai koefisien positif. Berdasarkan hasil pengujian, maka H3 dapat diterima karena hasil menunjukkan adanya pengaruh positif secara parsial pada variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah.

Pemerintah Pusat diposisikan sebagai prinsipal yang memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah selaku agen dalam pengelolaan dana transfer, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK), berdasarkan teori keagenan yang digagas oleh Jensen dan Meckling (1976). Melalui skema ini, DAK disalurkan ke daerah dengan tujuan untuk mendanai berbagai program atau kegiatan yang sifatnya khusus serta termasuk ke dalam agenda prioritas nasional. Temuan penelitian ini membuktikan bahwa DAK memiliki pengaruh dalam belanja daerah. Asimetri informasi yang terjadi antara pusat daerah dapat terjadi, mendorong perilaku *self interest* agen, seperti pengalokasian dana tidak sesuai standar yang menyebabkan hasil *output* yang tidak sesuai kondisi ini terjadi karena keterbatasan prinsipal dalam hal pengawasan.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh D. M. Apriliani et al. (2025), Fitriani & Hendaris (2023), Rohmah & Raharjo (2023), dan Santika et al. (2024) menemukan adanya pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah.

Beberapa faktor yang menjelaskan hubungan positif antara DAK dan belanja daerah yaitu DAK yang diterima daerah diwajibkan untuk direalisasikan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan sehingga secara otomatis meningkatkan belanja pada sektor terkait.

#### **4.4.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan dari hasil uji hipotesis (Uji t) hipotesis keempat menunjukkan hasil bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah secara parsial pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2024. Kenaikan DBH akan diikuti dengan kenaikan Belanja Daerah. Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai signifikansi lebih rendah sebesar 0,000 dari alpha yaitu 0,05 ( $0,000 < 0,005$ ) dengan nilai koefisien positif. Berdasarkan hasil pengujian, maka H4 dapat diterima karena hasil menunjukkan adanya pengaruh positif secara parsial pada variabel Dana Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah. Dapat disimpulkan bahwa Ketika Dana Bagi Hasil meningkat maka Belanja Daerah akan meningkat pula.

Dalam teori keagenan yang dicetuskan oleh Jensen & Meckling (1976), Pemerintah Pusat berperan sebagai prinsipal yang memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah selaku agen untuk mengelola dana transfer, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH). . Sebagaimana halnya DAU dan DAK, asimetri informasi antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan prinsipal tidak selalu dapat memantau secara efektif apakah belanja yang didanai oleh DBH benar-benar berorientasi pada kepentingan publik ataukah lebih banyak diserap oleh kebutuhan birokrasi. Kecenderungan *self interest* agen untuk mempertahankan atau meningkatkan

belanja aparatur menggunakan dana DBH merupakan salah satu implikasi nyata dari masalah keagenan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Temuan penelitian ini membuktikan bahwa DBH memiliki pengaruh dalam Belanja Daerah. Kenaikan pada kontribusi daerah yang bersumber dari sektor pajak dan kekayaan sumber daya alam ditunjukkan oleh tingginya perolehan Dana Bagi Hasil (DBH) yang didapatkan oleh pemerintah daerah. Dampak positif DBH terhadap alokasi Belanja Daerah ini memperkuat hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah diterbitkan oleh Lani et al., (2024), Nashiri & Amanah, (2018), Utami & Iskandar, (2020)

Faktor-faktor yang menjelaskan hubungan positif antara DBH dan belanja daerah yaitu, ketika DBH meningkat maka memperluas kapasitas fiskal daerah sehingga memberikan kesempatan yang lebih besar bagi daerah untuk merealisasikan belanja dan tekanan dari pusat untuk membelanjakan untuk keperluan peningkatan fasilitas dan pelayanan daerah.

#### ***4.4.5 Flypaper Effect***

Berdasarkan dari hasil uji hipotesis (Uji t) hipotesis kelima menunjukkan terjadinya fenomena *Flypaper Effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2024. Pembuktian fenomena *Flypaper Effect* dilakukan melalui dua syarat. Pertama, berdasarkan hasil uji t, variabel PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Kedua, berdasarkan perbandingan koefisien dana transfer dengan PAD. Nilai koefisien PAD 1,046 lebih kecil daripada nilai koefisien DAU, DAK, dan DBH, yaitu sebesar 3,638 (1,343 + 1,335 + 0,960). Hal ini dapat

disimpulkan terjadi *Flypaper Effect* pada Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat disimpulkan H5 diterima.

Kondisi *flypaper effect* mengindikasikan bahwa ketika Pemerintah Daerah menerima dana transfer dari Pemerintah Pusat, dana tersebut cenderung langsung dialokasikan untuk membiayai belanja daerah, bukan untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Nauw et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pengeluaran daerah lebih banyak dipengaruhi oleh dana dari pusat dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan secara mandiri oleh daerah. *Flypaper Effect* dapat menjadi bukti bahwa daerah belum bisa mandiri dan masih bergantung pada dana transfer dari pusat (Dewi & Aminda, 2023).

Ketergantungan yang berlebihan pada dana transfer pusat untuk membiayai Belanja Daerah tanpa dibarengi dengan optimalisasi PAD menunjukkan adanya sifat oportunistik dari Pemerintah Daerah. Perilaku ini muncul akibat adanya asimetri informasi, di mana pihak daerah menguasai data yang jauh lebih detail dibanding masyarakat dan Pemerintah Pusat. Dalam kacamata teori keagenan, munculnya fenomena *Flypaper Effect* tersebut menjadi pembenaran atas prediksi teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Keberadaan fenomena *Flypaper Effect* ternyata tidak hanya ditemukan di Provinsi Jawa Tengah saja, melainkan juga terdeteksi di berbagai wilayah lainnya. Kenyataan empiris ini didukung oleh temuan dari sejumlah penelitian terdahulu seperti yang diungkapkan oleh Fitriani et al., (2024), Lani et al., (2024), W. Putri & Kurnia, (2024) yang seluruhnya mencatat hasil serupa.

Terjadinya *Flypaper Effect* mengindikasikan bahwa mekanisme transfer dana dari pusat belum sepenuhnya efektif dalam mendorong kemandirian fiskal daerah. Sebaliknya, ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer justru semakin menguat seiring dengan meningkatnya alokasi transfer, yang pada akhirnya dapat menghambat upaya peningkatan PAD dan kemandirian fiskal daerah dalam jangka panjang.

Tingginya proporsi dana Transfer dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur APBD tidak terlepas dari permasalahan yang bersifat saling berkaitan dan berulang. Ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer terjadi karena capaian PAD yang masih minim Candra (2025), di mana kondisi ini tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya basis ekonomi daerah, tetapi juga mengindikasikan adanya kendala kelembagaan seperti rendahnya efektivitas pemungutan pajak, belum optimalnya pendataan wajib pajak, lemahnya integrasi data fiskal, serta pengelolaan aset daerah yang belum maksimal (Rerung et al., 2025). Kondisi ini secara khusus tercermin pada kabupaten/kota di Jawa Tengah, di mana rendahnya capaian PAD tidak lepas dari karakteristik struktur ekonomi sebagian besar kabupaten yang masih didominasi sektor pertanian dan industri pengolahan skala kecil-menengah, sehingga basis pemajakan daerah relatif sempit (Kuntum, 2023).

Di sisi lain, permasalahan PAD yang rendah juga tidak dapat dilepaskan dari struktur belanja daerah yang belum diarahkan secara optimal. Sebagaimana ditegaskan dalam bagian umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU

HKPD), belanja daerah selama ini masih didominasi oleh belanja aparatur dan kegiatan birokrasi, sementara alokasi untuk infrastruktur dan pembangunan daerah belum optimal. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu prasyarat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang baik dapat mempercepat distribusi barang dan jasa, membuka akses antarwilayah, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga memperluas basis pajak dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan PAD. Sebaliknya, ketika infrastruktur dikesampingkan, investor enggan masuk, aktivitas ekonomi berjalan lambat, dan basis pemajakan daerah tidak berkembang, sehingga PAD tetap stagnan. (Bully et al., 2024; Luter et al., 2019).

Kondisi inilah yang menciptakan lingkaran ketergantungan fiskal, PAD yang rendah memaksa daerah untuk mengandalkan dana transfer, namun dana transfer yang diterima tidak dialokasikan secara produktif untuk membangun infrastruktur yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi dan pendorong PAD di masa mendatang. Akibatnya, Kabupaten/Kota di Jawa Tengah berada dalam kondisi ketergantungan fiskal yang sulit diputus tanpa adanya reformasi menyeluruh pada pengelolaan belanja daerah.